

FOCUS



Waspada Konten di Medsos

PESATNYA perkembangan teknologi dengan keberadaan media sosial (medsos) kini sudah menjadi barang lumrah bagi banyak kalangan. Bahkan, bisa dibayangkan masyarakat seperti memiliki ketergantungan terhadap jaringan virtual berbasis internet itu.



ARIEF NOVIANTO
WARTAWAN TRIBUN JATENG

Sayang, masifnya penggunaan media anti-mainstream yang seharusnya bermanfaat untuk menyambung silaturahmi dan sosialisasi itu kini justru banyak disalahgunakan.

Fenomena yang terjadi, media sosial jamak digunakan banyak orang untuk hal negatif, mulai prostitusi, ujaran kebencian, hingga memprovokasi. Bahkan, konten negatif itu bisa muncul dengan tujuan dan pesan tertentu.

Hal itu seperti diungkap Satgas Patroli Siber Bareskrim Polri, dengan menangkap kelompok Saracen yang diduga melakukan kampanye penyebar ujaran kebencian di dunia maya.

Polisi menangkap anggota kelompok Saracen yang terdiri dari JAS (32) ditangkap di Pekanbaru; SRN (32) di Cianjur, serta MFT di Koja, Jakarta Utara.

"Mereka menyediakan jasa penyebaran ujaran kebencian yang bermuatan SARA maupun hoax melalui media sosial, mereka menamakan kelompok Saracen," ujar Kasubdit 1 Dit Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Irwan Anwar, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (23/8).

Menurut dia, kelompok Saracen memiliki ribuan akun media sosial dengan sistem kerja sesuai dengan permintaan dari pihak yang memesan, atau tergantung pemesanan.

"Kalau pesannya mau menjelek-jelekkan Islam, dia punya akun sendiri sampai 2.000, ribuan lagi kurang lebih hampir 2.000 itu yang menjelek-jelekkan Kristen, yang (menjelek-jelekkan-Red) pemerintah juga ada," paparnya.

Irwan menyatakan, banyak produk ujaran kebencian yang sudah dibuat melalui ribuan akun yang dimiliki kelompok itu.

Kepala Sub Bagian Operasi Satuan Tugas Patroli Siber, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, AKBP Susanto Purnomo berujar, tak hanya melalui medsos, mereka bahkan memiliki website sendiri untuk memosting berita-berita pesanan itu melalui Saracennews.com.

"Berita-berita yang tidak sesuai dengan kebenarannya itu tergantung pesanan. Banyak sekali pencemaran nama baik, yaitu kepada pejabat publik, tokoh masyarakat, dan sebagainya," jelasnya.

Dari realita itu, saya kemudian berpikir, itu baru Saracen, bagaimana jika ternyata ada banyak kelompok lain yang juga bekerja untuk menimbulkan kegaduhan di masyarakat, atau bahkan secara masif potensial memecah belah persatuan?

Tampaknya, kesadaran ber-medsos masyarakatlah yang menjadi faktor penentu, atau dalam arti perlu ada langkah preventif *person by person* untuk bisa mewaspada dan menyaring hal-hal negatif, tentunya dengan semangat menjaga kedamaian di negeri ini.

Forum Mahasiswa

Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke redaksi melalui email: opini.tribun.jateng@gmail.com, belum pernah dipublikasi di media lain. Artikel hendaknya diketik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, disertai copy (scan) identitas, nomor telepon dan foto. Setiap artikel yang telah dimuat di harian Tribun Jateng dapat dialihwujudkan dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Tribun Jateng.

Malaysia (Bukan) Negara Digdaya

BOLEH dibayangkan, hubungan antara Indonesia dengan Malaysia semakin renggang. Hal ini antara lain disulut oleh tindakan orang-orang Malaysia yang semena-mena. Insiden terhangat yang gencar dipublikasikan oleh media yaitu terbaliknya bendera merah-putih pada buku Opening Ceremony SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia (20/8/2017). Peristiwa tersebut terkesan disengaja oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, agar memancing emosi orang-orang Indonesia.

Bukan kali ini saja kasus "pelecehan" yang dilakukan oleh warga Malaysia. Yang paling sering dilakukan yaitu perlakuan memabibuta terhadap para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengundi nasib di negeri jiran tersebut. Seolah mendaulat diri sebagai majikan, mereka pun memperlakukan orang-orang Indonesia seperti budak. Bahkan, pemerintah Kerajaan Malaysia juga kerap melakukan deportasi terhadap TKI. Karena kasus keimigrasian, sebanyak 103 TKI sempat diusir dan dikurung selama berbulan-bulan di penampungan warga asing Malaysia.

Perlu disesalkan memang. Padahal, bila ditinjau dari segi kultural, antara Indonesia dengan Malaysia dapat ditarik garis lurus. Bagaimana tidak, kedua negara ini terikat dalam kultur melayu. Dengan latar belakang serumpun inilah sebenarnya tiada dalih untuk berseteru antara satu dengan yang lain. Sebaliknya, keduanya harus saling menguatkan dengan memupuk rasa persaudaraan.

Janggalnya, kerukunan kedua negara ini dalam perjalanannya masih jauh panggang dari api. Bukannya

menampilkan ritme keharmonisan, hubungan dua negara ini kian lama kian akut, dengan ditandai munculnya gejala permusuhan tiada akhir. Terlebih lagi, sikap pongah Malaysia yang turut memperdalam jurang perselisihan, sehingga memupus harapan bagi yang berhasrat menyemai kerukunan.

Problem Apatisme

Bila dicermati, aksi main hakim sendiri oleh pemerintah Kerajaan Malaysia mengindikasikan bahwa Malaysia ingin menunjukkan diri sebagai negara digdaya. Celakanya, cara yang diambil telah menyalahi norma sekaligus etika. Dengan kedigdayaannya, Malaysia ingin meyakinkan pada dunia bahwa pemerintahan Indonesia sangatlah lemah. Terbukti dengan keterlambatan atau bahkan pembiaran terhadap kasus yang menimpa para TKI.

Indikasi di atas seolah menemukan membenaran, sebab pemerintah Indonesia kurang memiliki komitmen serius serta agenda yang rigid dalam menindaklanjuti kesewenangan Malaysia. Hal tersebut menandakan bahwa perlindungan para TKI bukanlah menjadi prioritas utama. Bahkan, beban pendanaan penyumbang devisa terbesar tersebut kerap ditanggung sendiri. Perlindungan yang semestinya dinikmati para warga ternyata tidak diberikan. Padahal konstitusi secara tegas mengaturnya (Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 Ayat 2, Pasal 30 Ayat 1, dan Pasal 31 Ayat 1).

Realitas ini rentan menimbulkan problem apatisme. Kepercayaan warga terhadap negara akan berangsur-angsur hilang. Akibatnya, idealisme dan nasionalisme tergadaikan. Fakta bahwa sebagian warga Indonesia, terutama di daerah perbatasan, merasa hak dan kesejahteraan mereka dipenuhi oleh Malaysia—mulai dari listrik, makanan, hingga gas elpiji yang lebih murah—merupakan wujud apatisme yang dimaksud.

Aksi Nyata

Apabila tidak ingin berlari-lari, maka problem di atas sudah saatnya ditangani dengan serius. Yang perlu dilakukan bukanlah sekadar menebar janji belaka, seakan pemerintah memerankan diri selaku pejuang retorika. Busi pula tindakan reaktif atas gencarnya tuntutan kelompok penekan (*pressure group*), baik LSM, partai politik maupun kelompok akar rumput (*grass root community*). Namun, lebih pada inisiatif dan kesadaran pemerintah dalam menunaikan kewajiban.

Beberapa langkah yang perlu diambil yaitu: pertama, menyediakan lahan pekerjaan seluas mungkin bagi warga. Kebijakan ini membawa konsekuensi bagi semua perusahaan untuk lebih mengutamakan orang-orang pribumi. Pemerintah pusat, melalui tangan pemerintah daerah, harus menginstruksikan agar prosentase tenaga kerja putra daerah yang ditampung dalam perusahaan ditingkatkan hingga 80-90%. Harapannya, kisah orang-orang

tertindas dan terusir dari daerah sendiri tidak lagi terdengar. Semisal suku Sakai di Riau, suku Tobelo Dalam di Maluku Utara, juga orang-orang yang sejak lama bermukim di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, serta Nusa Tenggara Barat.

Kedua, pemerintah harus berani menjanjikan kesejahteraan warga dengan upah yang layak. Tidak bisa dimungkiri, alasan pilihan bekerja di luar negeri di antaranya adalah berburu upah lebih besar. Jika keringat tenaga kerja benar-benar dihargai, niscaya mereka lebih suka bertahan di negeri sendiri. Ditinjau dari segi psikologis dan sosiologis, mereka sebenarnya lebih suka berada di dekat teman dan keluarga. Mereka terpaksa melalanguana ke berbagai negara lantaran kesejahteraan dari pemerintah tidak kunjung tiba.

Ketiga, pemberlakuan moratorium impor terhadap Malaysia. Jika sementara ini, masih banyak barang dan bahan pangan yang sulit ditemukan atau diproduksi dalam negeri, pemerintah bisa bekerjasama dengan negara lain, selain Malaysia, untuk menyuplai. Tujuannya agar Indonesia tampil sebagai negara kuat, tidak menjadi pengemis di hadapan Malaysia.

Bagaimana dengan moratorium tenaga kerja? Itu hanyalah siasat "pemadam kebakaran" yang sebenarnya tidak menyentuh persoalan, bahkan bisa jadi sekadar menumpuk api kebencian dan amarah warga yang setiap saat bisa diluapkan. Mereka menuding negara hanya berfungsi sebagai petugas pencatat pelbagai keluhan dan lebih identik dengan "negara penjaga malam". (*)



RIZA MULTAZAM LUTHFY
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR
ILMU HUKUM UII YOGYAKARTA

Hotline Public Service

► Anda punya masalah terkait pelayanan publik (*public service*) di kantor pemerintah atau swasta? Sampaikan pertanyaan, keluhan, saran, dan kritik menyangkut layanan umum seperti air bersih PDAM, PLN, dokumen kependudukan & penataan kota kepada Tribun Jateng. Kami akan membantu mencari solusi kepada pihak-pihak yang berkompeten.



Hubungi RINI AMBARWATI di Telp: 024-8455959 atau SMS: 085712341233
SURAT: Tribun Jateng, Jalan Menteri Supeno No 30, Semarang, Jawa Tengah.
E-MAIL: redaksi.tribunjateng@gmail.com

